

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Marwan Ja'far. Dan kemudian pada tahun 2016 tongkat kepemimpinan beralih kepada Bapak. Eko Putro Sandjojo. (<http://kemendesa.go.id/view/kemendesa/1/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai fungsi dan tugas. Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Permendes No. 6 Tahun 2015 menyelenggarakan beberapa fungsi. Fungsi yang terkait dengan penelitian ini adalah perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi. (<http://kemendesa.go.id/view/kemendesa/2/tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki beberapa unit kerja yang terdiri dari Inspektorat Jendral, Sekretariat Jendral, enam Direktorat Jendral dan Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Informasi. Dimana salah satu Direktorat Jendral tersebut adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (<http://kemendesa.go.id>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018)

Penulis melakukan penelitian pada Divisi Satuan Kerja Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (<http://ditjenpkp.kemendes.go.id/view/page/1/tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018)

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi yang terkait dengan penelitian ini. Fungsi tersebut adalah Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan (<http://ditjenpkp.kemendes.go.id/view/page/1/tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018)

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai struktur fungsional yang dimana salah satunya adalah Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pasal 24 Bendahara pengeluaran mempunyai beberapa tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah mengelola Uang Persediaan & LS Bendaharan dan menerima, menyimpan, menatausahakan, dan

membukukan uang dalam pengelolaannya (<http://www.sjih.depkeu.go.id/fullText/2012/190~PMK.05~2012Per.HTM>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018)

Dalam menyelenggarakan pembukuan bendahara menggunakan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh kementerian keuangan dibawah Direktorat Jendral Perbendaharaan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Bab VI Bagian Kesatu (Penyelenggaraan Pembukuan Bendahara) pasal 31 ayat (1).

Sebelum adanya aplikasi perbendaharaan, bendahara menyelenggarakan pembukuan dengan cara manual. Dalam mengerjakan pembukuan bendahara dituntut untuk cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Namun dikarenakan sistem pengerjaan yang masih manual bendahara membutuhkan waktu yang lama serta butuh konsentrasi yang tinggi dalam mengerjakan pembukuan perbendaharaan. Untuk mempermudah kinerja karyawan Direktorat jendral perbendaharaan merilis aplikasi pembukuan perbendaharaan yang bernama Sistem Laporan Bendahara Instansi atau yang biasa disebut dengan singkatan SILABI.

Sistem Laporan Bendahara Instansi dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada bulan Juli 2014. Sistem Laporan Bendahara Instansi berfungsi juga sebagai media monitoring antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan Instansi terkait. Sistem Laporan Bendahara Instansi dirancang untuk mempermudah kinerja pengguna aplikasi

tersebut dari segi waktu, dan ke akuratan dalam penyusunan laporan perbendaharaan.

Bendahara pengeluaran Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah menggunakan aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi sejak bulan Juli 2014.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bendahara Pengeluaran Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengetahui efektivitas Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) terhadap kinerja karyawan Bendahara Pengeluaran.

Oleh karena itu, Penulis memberi judul penelitian ini *“Analisis Efektivitas Sistem Laporan Bendahara Instansi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bendahara Pengeluaran Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.”*

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peran Sistem Laporan Bendahara Instansi Instansi pada Bendahara Pengeluaran Direktorat Jendral Pembangunan kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi?

2. Apakah Sistem Laporan Bendahara Instansi pada Bendahara Pengeluaran Direktorat Jendral Pembangunan kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah efektif terhadap kinerja karyawan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Karya Ilmiah ini adalah :

- a) Untuk mengetahui peran aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) pada Bendahara Pengeluaran Direktorat Jendral Pembangunan kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- b) Untuk mengetahui efektivitas Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) terhadap kinerja karyawan pada Bendahara Pengeluaran Direktorat Jendral Pembangunan kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian Karya Ilmiah ini adalah :

a) Bagi Penulis

Dengan dilaksanakannya penulisan Karya Ilmiah ini penulis mengharapkan mendapat wawasan dan pengetahuan yang baru mengenai keefektivitasan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja pegawai yang digunakan pada Bendahara Pengeluaran Direktorat

Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

b) Bagi Bendahara Pengeluaran Ditjen PKP

Sebagai sarana tolak ukur keefektivitasan aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) terhadap kinerja pegawai dan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan aplikasi SILABI.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya Ilmiah ini di harapkan bisa menjadi referensi bacaan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Keefektivitasan Sistem Informasi Akuntansi khususnya aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI).